

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Selama beberapa tahun terakhir istilah tata kelola perusahaan yang baik semakin dikenal di kalangan pengusaha maupun masyarakat luas. Istilah tata kelola perusahaan yang baik pertama kali diperkenalkan oleh komite *Cadbury* pada tahun 1992 yang kemudian dikenal dengan istilah laporan *Cadbury*. Menurut komite *Cadbury* (1992), tata kelola perusahaan yang baik adalah sebuah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar memberikan pertanggung jawabannya kepada para pemegang saham.

Pengertian mengenai definisi tata kelola perusahaan juga beragam. Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, tata kelola perusahaan yang baik diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap mementingkan kepentingan pemegang saham lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu sistem untuk mengendalikan operasional perusahaan sehingga operasional perusahaan dapat berjalan sesuai dengan harapan pemegang saham (*Indonesian Institute for Corporate Governance*, 2012). Apabila tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik maka kinerja perusahaan akan baik sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *internal* dan *eksternal* lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sebuah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2001). *Organization Economic Cooperation and Development* (OECD, 2004) mendefinisikan tata kelola perusahaan adalah struktur dimana pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer menyusun tujuan-tujuan untuk mendorong terciptanya kinerja perusahaan yang kompetitif.

Isu mengenai tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dunia setelah terungkapnya skandal terbesar dalam sejarah Amerika Serikat yang melibatkan perusahaan Enron. Enron adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas dan komunikasi. Perusahaan Enron meningkatkan laba perusahaan dan menyembunyikan sejumlah utangnya. Skandal ini dibantu oleh salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big 5* yaitu KAP Arthur Andersen yang mana merupakan auditor perusahaan Enron.

Skandal kebangkrutan yang terjadi pada perusahaan besar di Amerika Serikat seperti Enron, Tyco International, Worldcom mengenai keterlibatan skandal akuntansi yang mengarah pada kredibilitas laporan keuangan perusahaan menyebabkan merosotnya keyakinan investor terhadap penyajian laporan keuangan. Hal ini menyebabkan munculnya *Sarbana oxley Act* yang disahkan oleh Presiden W. Bush pada tanggal 30 juli 2002. *Sarbana oxley Act* merupakan

undang-undang perlindungan terhadap investor dengan ekspektasi bahwa mekanisme tata kelola dapat diperkuat dan keandalan informasi keuangan terjamin.

Di Indonesia sendiri tata kelola perusahaan yang baik mulai menjadi perhatian ketika terjadinya krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1998 yang mana pada saat itu banyak perbankan dan perusahaan di Indonesia bangkrut akibat kurangnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan kurangnya tingkat transparansi perusahaan (Sayidah, 2007). Menyadari akan hal ini, Pemerintah Indonesia membentuk sebuah Komite Nasional *Corporate Governance* di Indonesia (KNKCG) pada tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri. KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan menerbitkan pedoman umum tentang tata kelola perusahaan yang baik pada tahun 1999 dan disempurnakan kembali pada tahun 2001 dan 2006.

Meskipun demikian, kasus mengenai lemahnya penerapan tata kelola perusahaan masih terjadi di Indonesia. Contohnya kasus akuntan publik Siddharta dan Harsono yang melakukan penyogokan terhadap aparat pajak di Indonesia untuk menerbitkan faktur palsu sebagai biaya yang harus dibayar kliennya pada tahun 2001. Serta kasus Perusahaan Kereta Api Indonesia yang terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan sehingga terlihat menguntungkan meskipun perusahaan sedang mengalami kerugian yang serius pada tahun 2005.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan sekumpulan praktek dan mekanisme kontrol yang digunakan sebagai panduan dalam mengelola sebuah

perusahaan guna mencapai kinerja yang efektif, efisien dan berorientasi sesuai dengan kepentingan para pemegang saham. (Mc.Kinsey & Company, 2002) menemukan bahwa investor di negara-negara maju mengatakan bersedia untuk membayar premi dengan harga yang lebih mahal untuk perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan konsisten.

Penelitian yang dilakukan oleh *Political dan Economic Risk Consultancy Ltd* (2013) Indonesia menduduki posisi kedua tertinggi tingkat korupsi di Asia yakni dengan skor 8,83 pada skala 10. Mensah, Aboagye, dan Buatsi (2003) menemukan bahwa praktik tata kelola yang buruk seperti korupsi dan pengungkapan yang kurang dapat menurunkan kinerja perusahaan. Berdasarkan survei penelitian yang dilakukan *Asian Corporate Governance Assosiation* (ACGA) pada tahun 2012 Indonesia berada di peringkat terakhir diantara 11 negara Asia Tenggara mengenai penerapan tata kelola perusahaan.

Perusahaan cenderung ingin memperoleh dana untuk operasional perusahaan dari pihak luar. Oleh sebab itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan dengan tujuan agar profitabilitas dan nilai saham perusahaan meningkat. Peningkatan saham perusahaan akan menarik perhatian investor untuk berinvestasi dengan harapan dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan.

Peningkatan nilai saham dan kinerja perusahaan juga dapat tercapai apabila kerja sama yang baik antara pihak manajemen dengan pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan. Namun dalam proses peningkatan kinerja perusahaan akan muncul konflik kepentingan antara manajer dan pemilik

perusahaan atau dikenal dengan istilah masalah keagenan. Menurut teori keagenan yang dikemukakan oleh Fama dan Jensen (1983) masalah keagenan terjadi ketika kepentingan manajer tidak sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan. Hal ini terjadi karena manajer akan bertindak secara oportunistik dengan mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi sebelum memenuhi kepentingan pemegang saham

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih *principal* (pemilik) menggunakan orang lain atau agen (manajer) untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang akan menyebabkan munculnya biaya keagenan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Hubungan antara tata kelola dan kinerja perusahaan adalah tata kelola dapat menunjang kinerja perusahaan. Seiring dengan meningkatnya tata kelola perusahaan yang baik maka kinerja perusahaan juga akan meningkat begitu juga sebaliknya untuk penerapan tata kelola perusahaan yang lemah, maka kinerja perusahaan juga akan semakin menurun. Kurangnya tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan merupakan penyebab utama kegagalan kinerja perusahaan di banyak perusahaan (Tornyeva & Wereko, 2012).

Oleh karena pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik terhadap kinerja perusahaan, maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan topik: “ **Analisis Pengaruh Tata Kelola terhadap Kinerja pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013** ”.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?
2. Apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?
5. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?
6. Apakah komite nominasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?
7. Apakah komite remunerasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
5. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
6. Untuk mengetahui apakah komite nominasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
7. Untuk mengetahui apakah komite remunerasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak manajemen perusahaan mengenai variabel apa saja di dalam tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Hasil ini juga dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, perusahaan diharapkan mampu

meningkatkan kinerjanya melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

2. Bagi investor

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi-informasi mengenai variabel-variabel tata kelola perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan serta sebagai salah satu bahan pertimbangan investor dalam melakukan analisa sebelum mengambil suatu keputusan investasi.

3. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan-temuan empiris di bidang akuntansi. Penelitian ini juga dapat dijadikan dapat menjadi sebagai referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya mengenai tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan.

1.4 Sistematika Pembahasan

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang dari penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang kerangka teoritis, penjelasan dari penelitian sebelumnya, dan model yang mendasari penelitian, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari rancangan penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data dan metode analisis data penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pengujian data yang dikumpulkan, analisis statistik deskriptif, hasil uji *outlier*, hasil uji regresi panel beserta dengan penjelasan atas hasil-hasil dari hipotesis yang diuji.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang memuat kesimpulan atas dari keseluruhan penelitian ini, temuan-temuan yang diperoleh dari hasil analisis dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian serta rekomendasi yang disarankan dapat memberikan manfaat untuk peneliti yang masa akan datang.